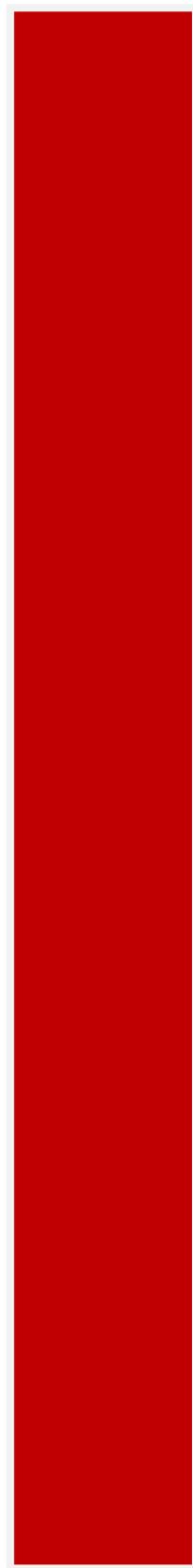


**LAPORAN
TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA
KELOLA BPR
2024**

**PT. BPR ARTHA KURNIA
RAHARJA**



A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
Nomor Telepon	021-83716747 / 83716742
Penjelasan Umum	<p>Pada penerapan tata kelola, BPR memiliki komitmen menjalankan tata kelola perbankan yang sehat secara konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sejalan dengan visi BPR yaitu menjadi BPR yang sehat, besar, kuat dan bermanfaat bagi semua pihak, BPR Artha Kurnia Raharja bertujuan untuk menjadi Bank yang sehat kondisi keuangannya, besar asset dan labanya, serta kuat permodalannya. Sehingga menjadi Bank yang mempunyai daya tahan, unggul dan berdaya saing tinggi serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada seluruh stake holder. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, melainkan juga melalui performa internal perusahaannya dan tata kelola. Praktek penerapan tata kelola di BPR Artha Kurnia Raharja salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan yang dianut oleh BPR yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moral, akhlak, integritas. 2. Semangat bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, peduli dan kerjasama. 3. Kompetensi. 4. Disiplin dan komitmen. 5. Tanggung jawab dan akuntabilitas. 6. Profesional. 7. Proporsional. 8. Interdependensi. <p>Penerapan tata kelola mencakup berbagai aspek diantaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris serta komite pendukungnya, pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest), pengelolaan fungsi kepatuhan dan audit, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, penentuan batas kredit, perencanaan bisnis, serta transparansi kondisi keuangan perusahaan. Dalam menerapkan tata kelola tersebut, harus didasari oleh prinsip-prinsip utama tata kelola yang biasa dikenal dengan sebutan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness). Penerapan tata kelola ini harus didukung oleh aturan dan pedoman pengelolaan, sehingga secara jelas dapat diterapkan oleh seluruh elemen perusahaan serta melakukan evaluasi secara berkala.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<p>Berdasarkan hasil Self Assesment atas pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja pada semester II tahun 2024, secara umum hasil nilai komposit yang ditetapkan yaitu 2 dengan predikat "Baik". BPR terus berupaya meningkatkan konsistensi atas komitmen terhadap penerapan tata kelola yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada seluruh stake holders. Dari hasil analisis terdapat aspek positif dan aspek negatif pada proses tata kelola, dalam hal ini akan menjadi perhatian BPR khususnya pada aspek-aspek negatif yang tentu perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan kesadaran risiko dan budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi. Selanjutnya untuk tercapai visi, misi dan nilai perusahaan maka perlu penguatan melalui 6 (enam) pilar penguatan organisasi yang diadopsi oleh BPR yaitu SPIRIT of AKR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Service excellent. 2. Productivity. 3. Innovative. 4. Responsibility. 5. Inisiative. 6. Trustworthy. <p>Hal ini dilakukan guna memastikan pengelolaan kelembagaan BPR dilakukan secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peningkatan penerapan tata kelola, BPR perlu untuk melakukan kaji ulang dan mengkinikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis BPR. Dengan demikian pada periode penilaian berikutnya diharapkan BPR akan mendapatkan peringkat komposit yang lebih baik lagi.</p>

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 3201295706700001
	Nama : Christina Carlina
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Wajib beritikad baik, jujur dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan mencapai tujuan usaha BPR. 2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tatib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU PT, UU Perbankan, POJK. 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR. 4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR. 5. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dibidangnya. 6. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko & Fungsi Kepatuhan. 7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan dan pemeriksaan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 8. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU PPT & PPPSPM. 9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian. 10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 11. Direksi wajib mempunyai pedoman dan tata tertib kerja. 12. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai . 13. Direksi wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR. 14. Merumuskan Rencana Bisnis BPR dan strategi pencapaiannya.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
1. Kegiatan bisnis lending : a). Penerapan kertas kerja daily activity untuk monitoring dan review kegiatan pemasaran. b). Penerapan Pipeline kegiatan pemasaran untuk monitoring dan review kegiatan pemasaran. c). Penerapan kertas kerja walk in customer. d). Penyelenggaraan komite kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan keputusan yang proper. e). Permintaan referensi kepada debitur yang baru menandatangani PK dan dropping kredit. f) Penetapan pengelolaan debitur kredit aktif. g). Penawaran kepada debitur existing dengan rekam jejak baik untuk melakukan Top Up pinjaman. h). Penawaran kepada debitur lunas dengan rekam jejak baik untuk mengajukan pinjaman kembali. i). Penyebaran brosur ke titik tertuju seperti di pasar-pasar dan lingkungan perumahan. j). Upload brosur pemasaran kepada anggota group tertentu di	

<p>facebook dan pengumpulan nomor telpon anggota group tersebut. k). Menjalin kerjasama dengan petugas ruko kawasan kantor untuk melakukan penyebaran brosur. l). Pemasangan spanduk kemitraan di tempat usaha debitur yang mempunyai usaha riil. m). Penyelenggaraan promo pada saat event tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan bidang Penyelesaian Kredit Bermasalah : a). Kegiatan penagihan, kunjungan debitur 4-5 debitur setiap hari. b). Evaluasi aktivitas penagihan, rapat rutin setiap minggu dan jika diperlukan. c). Monitoring kegiatan penagihan dan diadministrasikan ke dalam kertas kerja. d). Penetapan pengelolaan kredit bermasalah. e). Pengisian status report AYDA, Hapus Buku, KKR dan NPL. f). Penerapan pemberian Surat Peringatan dengan ketat untuk debitur wan prestasi. g). Pelaksanaan lelang jaminan untuk kredit aktif kol 5, 4, 3 yang cenderung pemburukan kol, kredit hapus buku dengan agunan memadai, AYDA. h). Pemberian surat somasi kepada debitur bermasalah. i). Membuat pengelompokan potensi penagihan kredit hapus buku dengan agunan memadai, kurang memadai dan tidak memadai. 3. Pelaksanaan coaching & conseling dan mendokumentasikan hasilnya dengan suatu komitmen perbaikan. 4. Pengaktifan forum diskusi tentang permasalahan, hambatan, kendala di masing-masing unit kerja. 5. Penghematan biaya melalui upaya : mencetak surat/dokumen lain minim kesalahan, penggunaan kertas bekas untuk drafting, mematikan perangkat elektronik apabila tidak sedang dipergunakan. 6. Dalam bidang pengendalian intern : a). Konsistensi kegiatan post booking review. b). Pelaksanaan test berkala untuk unit kerja bisnis dan operasional. c). Pelatihan APU, PPT & PPPSPM, Anti Fraud dan perlindungan konsumen untuk semua karyawan. 7. Dalam upaya meningkatkan kompetensi karyawan, secara berkala mengikut sertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan mengikuti sertifikasi untuk Pejabat Eksekutif secara bergantian. 8. Mengadakan sosialisasi secara berkala terkait ketentuan-ketentuan terbaru. 9. Melakukan monitoring atas tindaklanjut hasil pemeriksaan OJK dan memastikan seluruhnya telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 10. Memastikan seluruh laporan-laporan kepada otoritas terkait baik secara rutin maupun insidental telah di kirimkan secara tepat waktu. 11. Melakukan monitoring secara berkala atas penyelenggaraan teknologi informasi dengan memastikan core banking system yang dimiliki BPR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 12. Pelaksanaan kegiatan inklusi dan literasi keuangan telah dilakukan realisasi dengan jadwal yang sudah di tentukan BPR. 13. Memastikan kesiapan sistem BPR dalam melakukan perhitungan CKPN.
--

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : 3374131812630001</p> <p>Nama : Andreas Heryjanto Gondoseputro</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. 3. Memeriksa pembukuan dan transaksi BPR beserta seluruh dokumen transaksi, dokumen kekayaan BPR, berhak untuk mengetahui dan meminta penjelasan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.</p>

	<p>4. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan pengarahan, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategis. Dalam proses pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.</p> <p>6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit Internal, hasil pengawasan Dekom, Audit Eksternal, Pemeriksa OJK, dan/atau dari otoritas lainnya.</p> <p>7. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja bilamana menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perbankan, termasuk juga kondisi lainnya yang dapat merugikan kelangsungan hidup BPR.</p> <p>8. Melakukan pengawasan BPR dengan memastikan bahwa telah dilaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan organisasi BPR.</p> <p>9. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan RBB yang diajukan Direksi.</p> <p>10. Mengevaluasi dan menyetujui laporan tahunan yang dibuat Direksi.</p> <p>11. Membuat laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.</p> <p>12. Mengawasi secara aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p> <p>13. Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.</p> <p>14. Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan mengusulkan penetapan kebijakan remunerasi kepada RUPS serta melakukan evaluasi secara berkala.</p>								
2.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="280 1507 560 1548">NIK</td> <td data-bbox="560 1507 1411 1548">: 3173055105680011</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1548 560 1588">Nama</td> <td data-bbox="560 1548 1411 1588">: Sri Hidayati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1588 560 1628">Jabatan</td> <td data-bbox="560 1588 1411 1628">: Komisaris</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1628 560 2373">Tugas dan Tanggung Jawab</td> <td data-bbox="560 1628 1411 2373"> <p>1. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</p> <p>2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.</p> <p>3. Memeriksa pembukuan dan transaksi BPR beserta seluruh dokumen transaksi, dokumen kekayaan BPR, berhak untuk mengetahui dan meminta penjelasan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.</p> <p>4. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan pengarahan, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategis. Dalam proses pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.</p> </td> </tr> </table>	NIK	: 3173055105680011	Nama	: Sri Hidayati	Jabatan	: Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>1. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</p> <p>2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.</p> <p>3. Memeriksa pembukuan dan transaksi BPR beserta seluruh dokumen transaksi, dokumen kekayaan BPR, berhak untuk mengetahui dan meminta penjelasan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.</p> <p>4. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan pengarahan, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategis. Dalam proses pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.</p>
NIK	: 3173055105680011								
Nama	: Sri Hidayati								
Jabatan	: Komisaris								
Tugas dan Tanggung Jawab	<p>1. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</p> <p>2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.</p> <p>3. Memeriksa pembukuan dan transaksi BPR beserta seluruh dokumen transaksi, dokumen kekayaan BPR, berhak untuk mengetahui dan meminta penjelasan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.</p> <p>4. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan pengarahan, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategis. Dalam proses pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.</p>								

	<p>6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit Internal, hasil pengawasan Dekom, Audit Eksternal, Pemeriksa OJK, dan/atau dari otoritas lainnya.</p> <p>7. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja bilamana menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perbankan, termasuk juga kondisi lainnya yang dapat merugikan kelangsungan hidup BPR.</p> <p>8. Melakukan pengawasan BPR dengan memastikan bahwa telah dilaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan organisasi BPR.</p> <p>9. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan RBB yang diajukan Direksi.</p> <p>10. Mengevaluasi dan menyetujui laporan tahunan yang dibuat Direksi.</p> <p>11. Membuat laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.</p> <p>12. Mengawasi secara aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p> <p>13. Dewan Komisaris wajin menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.</p> <p>14. Dewan Komisaris wajib menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan mengusulkan penetapan kebijakan remunerasi kepada RUPS serta melakukan evaluasi secara berkala.</p>
--	---

--	--

	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Kredit Yang Diberikan (KYD) tidak maksimal, Tim Bisnis harus memiliki jaringan yang luas dan terkait pemberian insentif untuk AO diperlukan perubahan formula insentif. 2. Perkembangan NPL cenderung stagnan tidak mengalami perubahan yang signifikan, dalam upaya penurunan NPL perlu berkolaborasi antara Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) dan Tim Bisnis serta kepada PE PKB agar melakukan review terhadap bawahannya untuk menilai kinerja mereka. 3. Terdapat AYDA yang melebihi 1 tahun sehingga menjadi pengurang modal inti, Direksi agar melakukan upaya penyelesaian AYDA dengan lebih nyata dan cepat secara comprehensive. 4. Direksi agar melakukan upaya mempertahankan dan lebih memaksimalkan fungsi intermediasi Bank. 5. Direksi agar melakukan upaya-upaya sehingga KYD dapat lebih ditingkatkan secara maksimal dengan mempertimbangkan antara lain adanya pelunasan kredit sesuai tgl jatuh tempo yang sudah dapat diperhitungkan, kemungkinan pelunasan kredit dipercepat, dan penyelesaian kredit bermasalah. 6. Kredit Hapus Buku untuk jaminan yang memadai dan/atau kurang memadai agar dilakukan penagihan atau penyelesaian secara maksimal baik melalui penagihan atau lelang jaminan SHM. 7. Promotion : buatlah iklan promosi di brosur dengan menampilkan 25 BPR Group Saudara, hal ini bertujuan untuk menginformasikan atau branding ke masyarakat bahwa BPR Artha Kurnia Raharja merupakan bagian dari BPR Group Saudara yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. 8. Pricing : biaya provisi, administrasi dan suku bunga kredit, pada 3 hal tersebut harus lebih baik dibandingkan pesaing dimata konsumen serta menentukan target pasar yang akan dituju. 9. Strategi meraih keunggulan dalam bersaing harus memiliki inward looking yaitu mengandalkan faktor-faktor internal berupa sumber daya perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi Resoure Based View (tampilan berbasis sumber daya) menggunakan formula VRINE (Value, Rarity, Inimitability, Non Substitutability, Ekploitability).
--	---

10. NPL yang masih tinggi, Direksi agar melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan lebih maksimal dengan monitoring debitur agar tidak terjadi pemburukan kolektibilitas serta penyelesaian kredit dilakukan secara litigasi dan non litigasi.
11. Pemenuhan Audit OJK agar dimonitoring sehingga tidak ada yang terlambat ataupun tidak melaporkan, serta diusahakan jangan sampai terjadi temuan yang berulang.
12. Penerapan Fungsi Kepatuhan, fungsi kepatuhan agar mengkaji kembali untuk memastikan apakah semua kebijakan, SOP sudah dikinikan berdasarkan perubahan peraturan yang berlaku.
13. Penerapan program APU PPT & PPPSPM, Direksi agar memastikan untuk melakukan sosialisasi kebijakan & prosedur serta diterapkan pada unit kerja masing-masing. selain itu penerapan screening nasabah terhadap daftar hitam, DTTOT, DPPSPM, dan Judi Online harus dilakukan sesuai SOP yang berlaku.
14. Dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko, Direksi agar memastikan penerapan manajemen risiko beserta laporan manajemen risiko di semua bagian operasional dan perkredutan serta melakukan monitoring laporan OJK, mengadakan evaluasi kebijakan dan prosedur sesuai dengan regulasi terbaru, dan laporan internal dan eksternal telah dilaksanakan.
15. Penerapan Audit Intern dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan metode risk based dan melaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan.
16. Pelaksanaan penerapan teknologi informasi, Dewan Komisaris mengingatkan agar hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi jika terdapat kendala agar segera dikonfirmasi kepada vendor CBS untuk segera diperbaiki.
17. Dewan Komisaris mengingatkan agar Direksi memastikan pelaksanaan terkait perlindungan konsumen dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.									
2.									
3.									

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR ARTHA KURNIA RAHARJA	86.18	-
2	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA	45.67	-
3	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR PASAR BOJA	30.00	-
4	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA	80.00	-
5	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR KARANGWARU	76.00	-
6	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR SATRIA PERTIWI SEMARANG	50.00	-
7	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR SEMERU	80.00	-
8	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR INTAN SURYA	80.00	-
9	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR INTAN KITA	80.00	-
10	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR RAGA SAKTI	80.00	-
11	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. PUSPA KENCANA	96.12	-
12	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR PANCADANA	80.00	-
13	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR INTAN NASIONAL	83.33	-
14	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR METROPOLITAN PUTRA	83.85	-
15	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR GUNUNG MAS	98.00	-
16	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR SURYA MAS	80.10	-
17	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR MEGA	77.75	-
18	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR SAUDARAKU	72.99	-
19	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR KARUNIA DEWATA	80.49	-
20	3323030410570001	DRS AGUS PRAMONO	PT. BPR JATENG	80.00	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3201295706700001	Christina Carlina	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3374131812630001	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173055105680011	Sri Hidayati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3323030410570001	DRS Agus Pramono	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3323032407500002	Halim Susanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3201295706700001	Christina Carlina	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3374131812630001	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173055105680011	Sri Hidayati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3323030410570001	DRS Agus Pramono	Tidak Ada	Tidak Ada	Adik
2	3323032407500002	Halim Susanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Kakak

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	216.000.000	1	72.666.667
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		216.000.000		72.666.667
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasii				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya	1	1.366.000		
	Total Fasilitas Lainnya		1.366.000		
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		217.366.000		72.666.667

Keterangan : Pada posisi 31 Desember 2024 hanya terdapat 1 anggota Direksi sebagai Direktur, dan 1 anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris yang bergabung pada tanggal 18 Mei 2024. Dikarenakan susunan kepengurusan PT. BPR Artha Kurnia Raharja pada tahun 2024 terdapat 1 Direktur Utama yang mengundurkan diri pada 30 Juni 2024 dan 1 Komisaris Utama yang habis masa jabatannya pada 11 November 2024.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.80
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.80
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.21

Keterangan : Pada posisi 31 Desember 2024 hanya terdapat 1 anggota Direksi sebagai Direktur, dan 1 anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris yang bergabung pada tanggal 18 Mei 2024. Dikarenakan susunan kepengurusan PT. BPR Artha Kurnia Raharja pada tahun 2024 terdapat 1 Direktur Utama yang mengundurkan diri pada 30 Juni 2024 dan 1 Komisaris Utama yang habis masa jabatannya pada 11 November 2024.

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	04/06/2024	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Mei 2024) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
2.	05/07/2024	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Juni 2024) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
3.	02/08/2024	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Juli 2024) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
4.	04/09/2024	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan Agustus 2024) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis
5.	04/10/2024	2	Pembahasan Laporan Keuangan (Evaluasi realisasi kinerja bulan September 2024) Serta Rekomendasi Hal-Hal Strategis

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	3323030410570001	Agus Pramono	Pemegang Saham Pengendali	3201295706700001	Christina Carlina	Direktur	Sewa Gedung	0	Sewa Gedung Kantor Kas Citeureup

Keterangan : Terdapat sewa gedung (Kantor Kas Citeureup) kepada pemegang saham pengendali yaitu Bapak Agus Pramono, masa sewa gedung telah berakhir di 08 September 2024 dan sampai saat ini gedung tersebut masih dipergunakan oleh BPR sebagai Kantor Kas Citeureup namun belum ada perpanjangan sewa terbaru.

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	01/03/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Masjid Al-Amin	Panitia Masjid Al-Amin		500.000
2.	15/08/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan partisipasi kegiatan hari kemerdekaan RI	Panitia Desa Citeureup		200.000
3.	20/09/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Al-Amin	Panitia Masjid Al-Amin		250.000
4.	13/12/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan partisipasi perayaan Natal Perbarindo DPD DKI Jaya dan Sekitarnya	Perbarindo DPD DKI Jaya dan Sekitarnya		500.000

30 April 2025

PT. BPR ARTHA KURNIA RAHARJA



Christina Carlina
Direktur



Sri Hidayati
Komisaris